

## ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DI KELURAHAN SELENSEN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Anisa<sup>1(a)</sup>, Ratna Dewi<sup>2(b)</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>a)</sup>nisanisa1210@gmail.com, <sup>b)</sup>ratna.dewi@uin-suska.ac.id

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

28-05-2024

Diterbitkan Online:

13-08-2024

#### Kata Kunci:

Program Pemberdayaan, Komunitas Adat Terpencil, Kebijakan

#### Keywords:

Empowerment Program, Remote Indigenous Community, Policy

#### Corresponding Author:

ratna.dewi@uin-suska.ac.id

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kelurahan Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir. Program ini merupakan inisiatif pemerintah yang ditujukan khusus untuk masyarakat KAT. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, dan data dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pemberdayaan KAT di Kelurahan Selensen berhasil dilaksanakan, namun belum dapat dikatakan sukses sepenuhnya. Dari enam indikator yang dianalisis, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya manusia, komunikasi antar organisasi, karakteristik lembaga, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi implementor, hanya dua indikator yang memenuhi kriteria pelaksanaan yang efektif, yaitu komunikasi antar organisasi dan karakteristik lembaga.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of the Remote Indigenous Community (KAT) empowerment program in Selensen Village, Kemuning District, Indragiri Hilir Regency. This program is a government initiative explicitly aimed at the KAT community. This research uses a descriptive method with a qualitative approach, where data is collected through observation, interviews, and documentation. Research informants were determined using a purposive sampling technique, and data were analyzed using qualitative analysis. The results showed that the implementation of the KAT empowerment program in Selensen Village was successful but can only be partially successful. Of the six indicators analyzed, namely policy standards and objectives, human resources, inter-organizational communication, institutional characteristics, social, economic, and political conditions, and implementor disposition, only two indicators, inter-organizational communication and institutional factors, meet the criteria for effective implementation.*

### DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v3i2.195>

### PENDAHULUAN

Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil adalah salah satu program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan Komunitas Adat Terpencil. Program KAT merupakan sekelompok orang pedalaman yang terdiri dari jumlah tertentu yang memiliki keterbatasan geografis, ekonomis dan sosial,

budaya, miskin, terpencil, dan rentan sosial ekonomi (Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2014).

Persebaran Komunitas Adat (KAT) di Indonesia memiliki 24 Provinsi, 236 Kabupaten, 1,004 Kecamatan, 2.304 desa (Hatu & Hatu, 2023) Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis, Suku Akit di Kabupaten Rupert

Bengkalis Utara, Suku Jabatan Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu, Suku Bonai, dan Suku Laut (Duanu) yang terletak di Kabupaten Indragiri Hilir, dari macam-macam suku tersebut tergabung dalam Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang ada di Provinsi Riau ditinjau secara geografi dan demografi.

Pada umumnya lokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) terpencil dan sulitnya akses transportasi darat dan laut. Masyarakat Adat Terpencil di Provinsi Riau seringkali masih terpinggirkan secara ekonomi dan sosial serta tidak mendapatkan layanan sosial dasar. Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang sudah tersebar di seluruh kabupaten, termasuk di Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Jumlah masyarakat Komunitas Adat Terpencil di Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022 sebanyak 27 kepala keluarga. Dari 27 jumlah Kepala Keluarga tersebut terdapat 67 Jiwa laki-laki dan 56 Jiwa Perempuan. Dari jumlah keseluruhan Jiwa Komunitas Adat Terpencil yang menganut Agama Islam terdapat 20 Jiwa dan Non Muslim 103 Jiwa.

Kehidupan Komunitas Adat Terpencil yang hidup secara berkelompok dipelosok dengan hidup berpindah-pindah (*nomaden*) dan memiliki keterbelakangan kondisi dari segi ekonomi, rentan sosial, masih mengalami permasalahan ekonomi, tidak memiliki tempat tinggal dan terpencil (terisolir). Untuk Itu Pemerintah menyediakan program-program untuk meminimalisir angka kemiskinan yang telah diupayakan termasuk dalam penanggulangan, seperti kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan dan bantuan-bantuan sosial.

Kabupaten Indragiri Hilir yang saat ini telah menjalankan Program Komunitas Adat Terpencil yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial kabupaten Indragiri Hilir dilokasi dusun sukajadi di Kelurahan Selensen kecamatan kemuning, kemudian mengusulkan kerektorat KAT untuk diadakan penjajangan awal dan studi kelayakan. Kecamatan Kemuning Kelurahan Selensen merupakan salah satu lokasi untuk pelaksanaan Program KAT pada tahun 2021 dan akan diadakan pemberdayaan pada Tahun 2022.

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dalam bidang pemukiman mereka dibuatkan bangunan perumahan sebanyak 27 rumah. Menurut data Dinas sosial Rumah ini dibangun dengan kualitas yang cukup baik terdiri dari

atap seng, dinding yang terbuat dari papan, dan lantai yang berbahan semen. Komunitas Adat Terpencil (KAT) juga diberikan bantuan sembako, pendidikan, dan sarana prasarana lainnya sebagaimana dalam kebijakan pemerintah. Namun, berdasarkan prasarvei yang dilakukan peneliti. Terdapat beberapa indikasi masalah yaitu bantuan program pemberdayaan KAT tidak semua masyarakat KAT mendapat bantuan yang diberikan oleh pemerintah sehingga masih banyak masyarakat Komunitas Adat Terpencil belum menerima bantuan Program KAT di Kelurahan Selensen Kabupaten Inhil seperti bantuan sembako, uang tunai, alat pertanian dan sosialiasasi serta sarana prasaran seperti pendidikan dan prasarana lainnya.

Dalam hal ini bantuan program pemberdayaan KAT yang berikan oleh pemerintah kemudian disalurkan oleh Dinas Sosial dan untuk masyarakat KAT lebih banyak yang tidak menerima daripada yang menerima. Masyarakat KAT sulit untuk mengalami kesejahteraan baik dari segi material maupun spiritual Sehingga masih banyak masyarakat Komunitas Adat Terpencil di Kelurahan Selensen belum mendapatkan pemberdayaan seperti yang telah ditargetkan dari Program Pemerintah.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai program pemberdayaan komunitas adat terpencil telah dilakukan di berbagai daerah dengan fokus yang beragam. Sebagian besar penelitian ini menyoroti efektivitas program pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas adat dari berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Penelitian yang dilakukan di daerah lain seperti Papua dan Kalimantan telah menunjukkan bahwa program pemberdayaan dapat meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi komunitas adat.

Penelitian yang dilakukan oleh Urip Wahyudin, yang meneliti mengenai evaluasi program pemberdayaan komunitas adat terpencil di Kabupaten Asmat Provinsi Papua dengan *Stake's Countenance Model*, sub fokus kajian terdiri dari (1) *antecedents* (persiapan), (2) *transactions* (proses) dan (3) *outcomes* (hasil). Evaluasi program pemberdayaan komunitas adat terpencil ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa (1) Kondisi awal (*antecedents*) sebagai prasyarat pelaksanaan pemberdayaan maka aspek penyusunan program dan kegiatan belum sesuai dengan standar obyektif pemberdayaan dan kebutuhan masyarakat, (2) proses pelaksanaan (*transactions*) pemberdayaan fisik aktualisasinya sesuai dengan standar obyektif pemberdayaan dan kebutuhan masyarakat, sedangkan kegiatan non fisik pola dan mekanisme serta pengalokasian anggarannya belum sesuai dengan standar obyektif dan kebutuhan masyarakat, (3) Hasil (*outcomes*) kegiatan pemberdayaan belum sepenuhnya sesuai dengan standar indikator keberhasilan pemberdayaan (Wahyudin, 2020). Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai evaluasi program pemberdayaan komunitas adat terpencil dengan menggunakan *Stake's Countenance Model*. Namun penambahan data lebih lanjut dan analisis lanjutan dapat meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program dan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.

Sementara penelitian program Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir ini mengkaji ketercapaian implementasi program Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam enam indikator yaitu yang terdiri dari standar dan sasaran kebijakan, sumber daya manusia, komunikasi antar organisasi, karakteristik lembaga, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta disposisi implementor. Kemudian diharapkan hasil penelitian ini akan dapat memberikan temuan baru mengenai dampak nyata dari program KAT terhadap komunitas adat di Selensen. Rekomendasi yang dihasilkan bersifat spesifik dan aplikatif, berdasarkan data dan analisis terbaru, yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas program di masa depan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses dalam memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan lokasi penelitian dengan jelas dan detail (komprehensif). Metode penelitian kualitatif dapat memberikan penjelasan Implementasi Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir.

Sumber data digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dihasilkan melalui pelaksanaan penelitian di lapangan melalui tahap wawancara, dokumentasi dan observasi dan data sekunder. Data Sekunder merupakan aktivitas mempelajari buku-buku, jurnal, artikel maupun informasi lainya yang hubungan dengan penelitian peneliti.

Pengumpulan data yang menggunakan menggunakan tahapan wawancara, dokumentasi, observasi. Teknik penentuan informan penelitian menggunakan *purposive sampling*. Alasan menggunakan *purposive sampling* adalah karena pengumpulan data yang dilakukan secara *real time* serta melalui diskusi atau tanya jawab dari sumber-sumber yang dianggap dapat dipercaya mengenai topik yang ada di lokasi kejadian. Penggunaan *purposive sampling* tentunya dapat mempermudah peneliti dalam pengumpulan data yang benar-benar dibutuhkan untuk penelitian. Adapun informan penelitian berjumlah 6 orang, yang terdiri dari pihak Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir, pihak Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, pihak Kecamatan Kemuning, masyarakat Kelurahan Selensen, Kepala Suku KAT, dan masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Teknik analisis data penelitian ini adalah analisis kualitatif. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, fokus pada hal penting. Kemudian pada tahap penyajian data penelitian kualitatif, data dapat diperlihatkan oleh peneliti sebagai penghubung antara kategori. Terakhir penarikan kesimpulan dilakukan setelah penyajian data dilakukan yang berkenaan dengan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Hasil temuan penelitian, program Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir adalah salah satu program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan Komunitas Adat Terpencil. Program KAT merupakan sekelompok orang pedalaman yang terdiri dari jumlah tertentu yang memiliki keterbatasan geografis, ekonomis dan sosial, budaya, miskin, terpencil, dan rentan sosial ekonomi.

Kabupaten Indragiri Hilir yang saat ini telah menjalankan Program Komunitas Adat

Terpencil yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial kabupaten Indragiri Hilir dilokasi dusun sukajadi di Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning, kemudian mengusulkan kerektorat KAT untuk diadakan penjajakan awal atau survey awal dan studi kelayakan.

Penyelenggaraan bantuan sosial KAT yang dilakukan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Masyarakat Adat Terpencil (KAT) bertujuan untuk mengembangkan kemandirian masyarakat KAT agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya guna meningkatkan akses terhadap berbagai kegiatan sosial dan sosial layanan pemerintah.

Dalam Program KAT tersebut menegaskan bahwa pemberdayaan KAT yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh yang dilakukan oleh pemangku kepentingan pusat dan daerah, potensi sumber kesejahteraan sosial, sesuai dengan (PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2015, 2015).

Dalam pelaksanaan Program KAT di Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir. Masyarakat KAT tidak perlu lagi datang kekantor Dinas Sosial Tembilahan untuk mengurus berkas-berkas,di karena dari dinas sosial sendiri yang datang mengunjungi dan bersosialisasi langsung dengan masyarakat KAT di kelurahan Selensen.

Berdasarkan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti di lapangan bersama informan peneliti (Bidang Pemberdayaan Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, Masyarakat Kelurahan Selensen, Lurah Selensen, Camat Kemuning dan masyarakat Komunitas Adat Terpencil) di Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir dengan menggunakan Indikator Teori (Van Meter & Van Horn, 1975).

### **Standar dan Sasaran Kebijakan**

Dalam Pasal Peraturan Peraturan Presiden nomor 186 tahun 2014 bahwa pemberdayaan KAT adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan hak sebagai warga Negara;
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- c. Integritas KAT dengan system sosial yang lebih luas;
- d. Kemadiran sebagai warga Negara.

Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan KAT Penetapan Standar dan Sasaran Kebijakan Termasuk Dalam Tahapan Persiapan Sebagaimana Tertera Dalam Peraturan

Menteri Sosial Nomor 12 tahun 2015 pasal 12 ayat (2). Rancangan program KAT ini menjadi suatu tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dalam pemberdayaan KAT yang mana diawali dengan penjelajahan awal dan studi kelayakan yang dilakukan oleh beberapa unsur pelaksana yang terdiri dari supervisor dari direktorat pemberdayaan KAT Kementerian Sosial, Akademis, Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Dinas Kesehatan, Serta Dinas Kehutanan dan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Berdasarkan hasil penjajagan awal dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial kabupaten Indragiri Hilir dilokasi Dusun Sukajadi di Kelurahan Selensen kecamatan kemuning, kemudian mengusulkan kerektorat KAT untuk diadakan penjajagan awal dan studi kelayakan adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan insfrakstruktur berupa, meliputi penyediaan rumah layak huni dan perbaikan akses jalan dan transportasi dan pemberian pendidikan;
- b. Pemberian sembako setiap Tahunnya;
- c. Bimbingan/sosialisasi pada masyarakat KAT.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Indagiri Hilir bersama kordinator pelaksana program KAT memberikan penjelasan bahwa implementasi program KAT sudah terlaksana dengan baik dan dari dinas sosial menjalankan sesuai dengan kebijakan dari kementerian.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa sub indikator standar kebijakan dalam implementasi program KAT sudah cukup optimal hal walaupun masih banyak masyarakat KAT yang tidak menempati dan juga pemberian bantuan tidak terealisasikan dengan baik hal tersebut dibuktikan masih banyaknya masyarkat KAT yang belum mendapatkan semua jenis bantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Selanjutnya sasaran implementasi dalam pemberian bantuan Program Pemberdayaan KAT kepada masyarakat KAT di Dusun Sukajadi Kelurahan Selensen telah terpenuhi meskipun belum sepenuhnya optimal. Proses kebijakan harus disertai dengan kejelasan informasi sehingga kebijakan yang disampaikan dapat diterima dengan jelas sehingga pelaksana kebijakan dan sasaran mampu mengetahui maksud,tujuan dan sasaran kebijakan tersebut namun, apabila informasi

yang diberikan tidak jelas akan terjadi pengambat dalam implmentasi kebijakan (Sarjono & Sulistiadi, 2018).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas peneliti menemukan fakta bahwa masyarakat KAT di Kelurahan Selensen belum sepenuhnya program KAT didapatkan oleh masyarakat KAT. Hal tersebut dikarenakan masih ada jenis bantuan yang tidak terealisasikan dengan baik seperti bantuan sembako dan uang tunai masih banyak masyarakat KAT yang tidak mendapatkan bahkan lebih banyak tidak dapat daripada yang dapat namun, untuk bantuan rumah layak huni sendiri sudah ada disediakan langsung dari kementerian dan itupun masyarakat KAT nya tidak menempati rumah tersebut dikarenakan tidak terbiasa tinggal dikota dan sulit mencari nafkah.

Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi program Pemberdayaan KAT di Kelurahan Selesen belum optimal. Dalam Implementasi Program Pemberdayaan KAT serta standar kebijakan yang digunakan dalam pelaksanaan Program pemberdayaan KAT ini berasal dari Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014.

### Sumber Daya

Sumber daya manusia dalam implementasi Porgram pemberdayaan KAT yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir pada bidang pemberdayaan yang terdiri dari dinas sosial, Kasubag, kepala bidang pemberdayaan, pekerja sosial ahli muda dan koordinator pelaksana Program Pemberdayaan KAT. Adapapun sumber daya yang disediakan adalah sumber daya manusia dan non manusia. Adapun fasilitas sumber daya manusia oleh Dinas Sosial Kabupaten Indagiri Hilir adalah berupa penyediaan rumah layak huni, uang tunai, alat pertanian dan pemberian sembako setiap tahunnya.

Selanjutnya sumber daya non manusia berupa anggaran memiliki peran penting ketika penentuan keberhasilan maupun kegagalan suatu kebijakan, dan kadang-kadang sebuah program membutuhkan anggaran besar guna menghasilkan program berkualitas.

Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn yang dikutip Agustino, sumber daya meliputi tenaga kerja, keuangan, fasilitas dan waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan kebijakan tersebut (Agustino, 2016). Hal ini

didukung dalam penelitian Fauzan, bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu hal yang berhubungan dengan tindakan mengobati manusia dengan baik dan manusiawi bahwa tugas yang diberikan dilaksanakan dengan benar dan professional (Fauzan et al., 2020).

Hal tersebut berlaku juga dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan KAT. Berikut Jumlah anggaran yang digunakan dalam program pemberdayaa. KAT adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Anggaran Program Pemberdayaan KAT**

Jenis Bantuan	Jumlah (Rp.)	Volume	Jumlah (Rp.)
Bimbingan sosialisasi	35 Juta	3 Kali	105 Juta
Bantuan uang tunai	3 Juta	27 Kepala Keluarga	81 Juta
Bantuan Sembako	1 Juta	27 Kepala Keluarga	108 Juta
Bantuan alat pertanian	30 Juta	4 Kelompok	120 Juta
<b>TOTAL (Rp.)</b>			<b>414 Juta</b>

Sumber: *Olahan Peneliti (2024)*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama informan, peneliti menemukan bahwa anggaran juga bahwasannya jika dilihat dari sisi ketersediaan dana untuk pelaksanaan Program tidak terdapat kendala. Namun ketika peneliti memeriksa kelengkapan bertemu dan wawancara bersama kepala sukunya mengatakan bahwa pembagian bantuan program dari dinas sosial ini tidak merata bahkan lebih banyak yang tidak mendapatkan daripada yang mendapatkan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan peneliti menemukan fakta bahwa dari anggara Program Pemberdayaan KAT yang berjumlah 414 Juta yang terdiri dari bantuan sembako, uang tunai, alat pertanian, bimbingan sosial dan untuk bantuan rumah layak huni tidak termasuk dalam anggaran tersebut dikarenakan bantuan rumah layak huni memang disediakan langsung oleh kementerian dan untuk biaya pelaksanaan menjalankan program Pemberdayaan KAT juga menggunakan beberapa dari anggaran yang disediakan oleh APBN. Maka dapat peneliti simpulkan bahwa indikator sumber non manusia dalam implementasi program pemberdayaan KAT belum efektif baik dari sumber daya manusia maupun non manusia hal ditersebut dikarenakan anggaran yang disediakan dari pemerintah tidak semua masyarakat KAT

mendapat bantuan Program Pemberdayaan KAT yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir. Hal tersebut juga didukung dari hasil penelitian (Tranggono et al., 2020) bahwa indikator sumber daya dalam indikator ini dapat dikatakan berhasil apabila sarana prasarana yang disediakan tersalurkan dengan baik dan secara merata.

### **Komunikasi Antar Organisasi**

Komunikasi mencakup kerjasama dengan melibatkan pihak instansi lain dalam pelaksanaan Program tersebut agar implementasi program pemberdayaan KAT dapat terlaksana dengan baik. Hal ini juga didukung dalam penelitian (Kasidin, 2023) bahwa komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan dan informasi sedemikian rupa sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat berjalan dengan baik.

Dinas Sosial bekerjasama antar organisasi dalam implementasi Program Pemberdayaan KAT di Kelurahan Selesen Kabupaten Indragiri Hilir yaitu antara Dinas pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (KPKSK), Camat Selesen, Kantor Lurah Selesen, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan kepala suku masyarakat KAT. Namun dari bentuk kerjasama dengan dinas seperti yang disebutkan oleh kordinator pelaksana dan Kepala Dinas Sosial dan peneliti mencari informasi mendalam melalui dengan pihak Dinas Sosial tetapi mereka membatasi informasi yang diberikan kepada peneliti kemudian peneliti mengobservasi dan menganalisis laporan-laporan kegiatan yang dilakukan oleh mereka dan sepertinya dalam pelaksanaan kegiatan hanya dilaksanakan oleh pihak dinas sosial sendiri tidak ada terlihat instansi lain seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan ketika peneliti melakukan wawancara kembali dengan kepala suku KAT nya pun mengatakan bahwa ketika diadakan sosialisasi dan pembagian bantuan hanya ada pihak Dinas Sosial saja tidak ada pihak instansi lain.

Dari hasil wawancara diatas bersama informan, peneliti menemukan fakta bahwa komunikasi kerjasama dan koordinasi setiap instansi yang terlibat dalam program pemberdayaan KAT di Kelurahan Selesen Kabupaten Indragiri Hilir saat ini berjalan dengan cukup efektif hal tersebut dibuktikan dengan salin keterbukaan dan membantu satu

sama lain agar implemmentasi program pemberdayaan KAT ini dapat berjalan dengan efektif yang bertujuan memberdayakan masyarakat KAT yang ada di Kelurahan Selesen Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam hal tersebut penggunaan indikator dalam teori Van Metter yang didukung oleh penelitian terdahulu bahwa implementasi kebijakan tidak akan berhasil jika tidak adanya kerjasama dan keterbukaan antar instansi yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.

### **Karakteristik Lembaga**

Karakteristik lembaga dapat mempengaruhi bagaimana kebijakan akan dijalankan. Karakteristik lembaga atau agen pelaksana meliputi tugas serta spesialisasi mereka dalam penyelenggaraan kebijakan. Dengan menguraikan spesialisasi dan tugas dari setiap lembaga kita dapat melihat sejauh mana karakteristik mereka dapat berkontribusi dalam keberhasilan kebijakan yang diimplementasikan.

Dalam proses Implemmentasi Program Pemberdayaan KAT di Kelurahan Selesen Kabupaten Indragiri hilir, terdapat agen pelaksana yaitu bagian bidang pemberdayaan Dinas Sosial sesuai dengan SK yang telah dikeluarkan dari pemerintah pusat. Agen pelaksana mempunyai tanggung jawab untuk menyusun rencana aksi sampai dengan pelaporan pelaksanaan implemmentasi program pemberdayaan KAT di Kelurahan Selesen Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan hasil penelitian dengan beberapa informan, pelaksanaan program Pemberdayaan KAT sudah selaras dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, Namun dari Dinas Sosial dalam melaksanakan Program pemberdayaan KAT Ini dirasa masih kurang. Hal tersebut dikarenakan belum adanya kebijakan langsung dari Dinas Sosial nya sendiri yang merupakan sebagai agen pelaksana dalam program pemberdayaan KAT ini sehingga para agen pelaksana masih belum memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan kebijakan sehingga mengakibatkan tujuan kebijakan masih belum tercapai secara maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa setiap instansi yang terlibat baik dari agen pelaksana maupun masyarakat yang ada di Kelurahan Selesen Kabupaten Indragiri Hilir sangat mendukung berjalannya program KAT

ini. Harapan Dinas Sosial selaku agen pelaksana dan instansi yang terlibat di Kelurahan dan Kecamatan serta masyarakat agar bantuan tersebut dapat terus berjalan dan adanya bentuk bantuan lainnya seperti pendidikan. Dalam indikator tersebut juga sebagaimana penelitian terdahulu bahwa indikator karakteristik lembaga ialah sebuah dukungan dilaksanakannya program tersebut baik dari pihak koordinator, kelurahan, kecamatan maupun masyarakat yang penerima bantuan.

### **Kondisi Ekonomi, Sosial, Politik**

Dalam pelaksanaan sebuah program tentunya terkait kondisi sosial, ekonomi dan politik selama Program tersebut dijalankan. Menurut model implementasi yang dikemukakan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn, kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik sebuah wilayah dapat dijadikan penyebab kegagalan dalam implementasi program (Van Meter & Van Horn, 1975).

Lingkungan eksternal memiliki pengaruh signifikan ketika menjalankan kebijakan. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian (Hamdani et al., 2022) bahwa untuk mengentaskan kemiskinan dan memberikan kesejahteraan masyarakat melalui upaya memberikan pertolongan ataupun bantuan program agar keluar dari kondisi tersebut sama halnya dengan program pemberdayaan KAT ini yang menjadi salah satu program untuk mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat KAT agar mengalami pemberdayaan. Pemberdayaan Masyarakat dalam penelitian Supriansyah ada tiga proses peningkatan kapasitas yakni penguatan kapasitas individu, kelembangaan dan sistem jaringan (Supriansyah et al., 2022).

Berdasarkan wawancara bersama informan, dalam implemementasi Program Pemberdayaan KAT, kondisi ekonomi dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan KAT di Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir hal tersebut dapat peneliti lihat dari anggaran yang disediakan dalam pelaksanaan program KAT, yang mana anggaran bantuan berasal dari APBD sampai saat ini terjadi suatu konflik yang tidak signifikan. Pernyataan tersebut sebagaimana yang disampaikan Bapak H. Saipul, S.Ag. M.Pd selaku pekerja ahli muda sekaligus kordinator pelaksana Program Pemberdayaan KAT mengatakan bahwa:

*“ . . . Untuk kondisi ekonomi sendiri dek dalam pelaksanaan program KAT ini tidak*

*mempengaruhi kondisi ekonomi kami yang selaku agen pelaksana program ini karena sudah ada anggaran dari APBN yang disediakan untuk program kat ini yang telah diatur oleh Kementerian Sosial, kami hanya melaksanakan kebijakan sesuai permintaan dari pusat”* (H. Saipul, S.Ag. M.Pd selaku pekerja ahli muda sekaligus kordinator pelaksana Program Pemberdayaan KAT, 3 Januari 2024).

Berdasarkan wawancara bahwa kondisi ekonomi agen pelaksana program pemberdayaan KAT tidak mempengaruhi ekonomi pelaksana dan tidak menjadi masalah dikarenakan dalam pelaksanaan program tersebut telah disediakan anggaran dari APBN yang telah tetap oleh pemerintah. Begitu pula dengan jenis bantuan yang diberikan kepada masyarakat KAT semuanya telah ditanggung oleh pemerintah.

Adapun bantuan yang disediakan oleh pemerintah untuk Masyarakat KAT yang mana terdiri dari 6 jenis bantuan yaitu bantuan rumah, sembako, uang tunai, alat pertanian, bimbingan sosialisasi dan rumah layak hunik yang berjumlah 27 KK yang disebut dengan program Pemberdayaan KAT. Namun untuk rumah bantuan sendiri tidak digabung anggarannya dengan keempat bantuan tersebut dikarenakan untuk bantuan rumah layak huni sendiri diberikan oleh kementerian. Bantuan ini bertujuan untuk memberdayakan dan masyarakat KAT yang ada di Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir agak dapat hidup layak seperti masyarakat lainnya.

Namun berdasarkan hasil survei dan wawancara bersama informan peneliti yaitu kepala suku masyarakat KAT, ditemukan fakta bahwa dari kelima jenis bantuan program Pemberdayaan KAT belum terimplementasi secara optimal. Hal tersebut dikarenakan 5 jenis bantuan dalam program pemberdayaan KAT masih banyak masyarakat KAT yang tidak mendapatkan bantuan tersebut seperti bantuan sembako, uang tunai dan peralatan pertanian. Sebagaimana pernyataan dari kepala suku masyarakat KAT mengatakan bahwa

*“ . . . Bantuan memang ada dek, tapi yang dapat hanya beberapa orang saja padahal pas mau pendataan 27 KK masyarakat KAT katanya dapat semua, tapi pas pembagiannya yang dapat hanya 7-8 orang saja. Tapi kalau untuk bantuan rumah layak huni dapat semua 27 kk itupun dari kementerian langsung tapi saat ini yang*

*tinggal dirumah itupun 1 orang karena masyarakat KAT gak terbiasa tinggal di kota dan susah juga mereka mencari makan”* (Kepala Suku, 13 Januari 2023).

Selanjutnya kondisi sosial dalam implemmentasi program pemberdayaan KAT. Kondisi lingkungan sosial pun dapat mempengaruhi implementasi dimana hal tersebut bisa memberi dampak yang positif bahkan negative. Pada Kebijakan Program Pemberdayaan KAT yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mana sasaran utama dalam program KAT ini adalah Masyarakat KAT yang ada di Kelurahan Selensen Kabupaten Indagiri Hilir.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sosial yang merupakan agen pelaksana dalam program Pemberdayaan KAT mampu mencerminkan pribadi pelaksana melalui sikap perilaku pada saat menjalankan perannya dalam pelaksana Program KAT maupun dalam lingkungan masyarakat yang ada di Kelurahan Selensen. Kondisi sosial agen pelaksanaan dalam melaksanakan program KAT baik saat melaksanakan maupun di lingkungan masyarakatnya di Kelurahan Selensen sudah cukup terlaksana dengan baik.

Selain kondisi ekonomi dan kondisi sosial, keadaan politik yang kurang kondusif termasuk salah satu faktor yang menghambat kebijakan implementasi. Dukungan yang datang dari lingkungan politik juga sangat dibutuhkan. Kondisi politik dalam implementasi program pemberdayaan KAT pada lingkup Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir terbilang kondusif.

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan memberikan gambaran bahwa lingkungan politik sangat berpengaruh hal tersebut terkait dengan *decision maker* atau pembuatan kebijakan tentunya menjadi penentu tidak adanya anggaran dalam program pemberdayaan KAT. Namun hal tersebut tidak sependapat dengan pendapat pihak kecamatan kemuning sedangkan dari pihak kecamatan memberikan gambaran bahwa mereka menganggap tidak ada pengaruh politik dengan kegiatan program pemberdayaan KAT ini. Mereka hanya sebagai perpanjangan tangan saja. Menurut hemat peneliti setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pejabat publik tentunya berangkat dari system politik. Setiap dalam

proses politik tentunya ada proses input dan output bahkan menimbulkan outcome didalamnya apakah masyarakat mengalami kesejahteraan atau tidak. Dalam hal tersebut akan sangat dipengaruhi oleh sistem politik.

Maka dari hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa indikator kondisi ekonomi, sosial dan politik masih belum efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan kondisi masyarakat KAT yang belum mengalami kesejahteraan dan pemberdayaan. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Hamdani bahwa untuk mengentaskan kemiskinan dan memberikan kesejahteraan masyarakat melalui upaya memberikan pertolongan ataupun bantuan agar keluar dari kondisi tersebut sama halnya dengan program pemberdayaan KAT ini yang menjadi salah satu program untuk mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat (Hamdani et al., 2022).

### **Disposisi Implementor**

Agar implementasi Program Pemberdayaan KAT berhasil, para pelaksana harus memiliki pengetahuan tentang tugas yang harus dilakukan dan juga memiliki kemampuan serta motivasi yang tinggi untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan antusias dan responsive.

Meskipun suatu organisasi telah dibagi dengan jelas mengenai tugas pokok dan fungsi, tidak bisa diabaikan kemungkinan terjadinya patologi atau gangguan pada implementasi kebijakan. Mungkin saja terdapat situasi di mana agen pelaksana tidak niat ataupun tidak menganggap serius ketika melaksanakan kebijakan tersebut. Ketidakterseriusan menjalankan tugas pokok dan fungsi bisa dilihat dari rendahnya tingkat produktivitas, dan pada akhirnya bisa menghambat pencapaian dari tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, sikap dari agen pelaksana dan masyarakat menunjukkan dukungan yang positif. Namun dalam pelaksanaannya, kembali lagi pada pelaksana bantuan programnya baik yang menyalurkan maupun yang menerima bantuannya. Hal tersebut dibuktikan dengan pembagian bantuan sembako yang tidak merata sehingga masyarakat KAT yang ada di Kelurahan Selensen masih banyak yang belum mendapatkan bantuan tersebut.

Disposisi merupakan kesepakatan pihak pelaksana guna menjalankan suatu kebijakan. Ketika Implementasi program Pemberdayaan



KAT di Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir ingin berhasil, tidak hanya cukup bagi para pelaksana untuk mengetahui hal yang perlu dilaksanakan serta mempunyai keahlian dalam menjalankan kebijakan tersebut, tetapi mereka perlu mempunyai sikap dan komitmen yang kuat. Dalam menjaga komitmen dalam melaksanakan Program Pemberdayaan KAT ini terdapat SK yang dikeluarkan oleh pemerintah, Standar Prosedur Operasional (SOP) dan peraturan dari Kementerian sosial dari pemerintah. Hal tersebut menjadi sebuah komitmen dari agen pelaksana program. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, komitmen agen pelaksana belum maksimal karena masih terdapat beberapa masalah sebagai contohnya masih banyak masyarakat KAT yang tidak mendapatkan bantuan sembako padahal ketika pendataan masyarakat KAT yang berjumlah 27 KK memiliki anggaran yang dikhususkan untuk masyarakat KATnya yang telah berikan oleh pemerintah namun ketika penyaluran yang dapat hanya 7 atau 8 KK. Dimana seharusnya masyarakat KAT yang berjumlah 27 KK ternyata yang tersalurkan hanya beberapa saja dan juga ketidampungan mereka memberikan sejumlah data-data sekunder kepada peneliti bahkan informasi yang pelaksana berikan melalui wawancara banyak bertolak belakang dengan informasi yang diberikan oleh pihak kepala suku Masyarakat KAT nya dan juga telah dibahas pada bagian-bagian sebelumnya.

Pelaksanaan kebijakan tentunya juga harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Implementasi Program Pemberdayaan KAT yang dilakukan sesuai dengan Peraturan menteri sosial nomor 12 tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT). Peraturan ini menjadi panduan dalam pelaksanaan program KAT. Maka dapat disimpulkan bahwa sub indikator disposisi implementor program pemberdayaan KAT di Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir sudah cukup efektif. Hal tersebut juga dibuktikan dari penelitian terdahulu bahwa indikator disposisi implementor dikatakan berhasil apabila pelaksana program berkomitmen terhadap tugasnya.

## PENUTUP

Hasil penelitian program Impelementasi pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan hasil, dari indikator

Standar dan sasaran kebijakan dalam pelaksanaan program KAT belum optimal. Indikator sumber daya dalam implementasi program pemberdayaan KAT belum efektif baik dari sumber daya manusia maupun non manusia hal ditersebut dikarenakan anggaran yang disediakan dari pemerintah tidak semua masyarakat KAT mendapat bantuan Program Pemberdayaan KAT yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir.

Indikator komunikasi antar organisasi, saat ini berjalan dengan cukup efektif hal tersebut dibuktikan dengan salin keterbukaan dan membantu satu sama lain agar Impelementasi program Pemberdayaan KAT. Indikator karakteristik lembaga sudah cukup efektif karna setiap instansi yang terlibat mendukung pelaksanaan program pemberdayaan KAT ini. Indikator kondisi ekonomi, sosial dan politik, masih belum efektif dikarenakan masyarakat KAT belum mengalami pemberdayaan dan kesejahteraan baik secara ekonomi maupun sosial. Indikator disposisi implementor, sudah cukup efektif. Namun dalam memberikan informasi kepada peneliti tidak signifikan dengan apa yang informasi di lapangan.

Berdasarkan 6 (Enam) indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi program pemberdayaan KAT di Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir belum berjalan dengan lancar dan belum dapat dikatakan berhasil karena dari ke 6 indikator hanya 2 yang memenuhi syarat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Fauzan, M. O., Disman, D., Yuniarsih, T., & Santoso, B. (2020). The Effect of Communication and Job Satisfaction Towards the Performance of Civil Servants in Jambi Province, Indonesia. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 187–197.
- Hamdani, H., Lukman, A. I., Singal, A. R., Mustangin, M., Winarti, H. T., & Alisalman, M. (2022). The Implementation of Training Programs to Make Tumpeng for the Community. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 9(2), 144–154. <https://doi.org/10.21831/jppm.v9i2.50039>

Hatu, D. R. R., & Hatu, R. I. R. (2023). Modal sosial Masyarakat Komunitas Adat Terpencil Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 354–360.

*Kabupaten Asmat Provinsi Papua (2013-2017)*. Universitas Negeri Jakarta.

Kasidin, R. (2023). *and Work Culture on Work Motivation on Civil Servants*. 2023(1), 1–20.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (2015).

Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia (2014).

Sarjono, A. H., & Sulistiadi, W. (2018). Analysis of Policy Implementation for The Improvement Capability of Internal Government Supervisory Apparatus (APIP) at Inspectorate General of Ministry of Health. *Journal of Indonesian Health Policy and Administration*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.7454/ihpa.v3i1.2104>

Supriansyah, M., Syafari, M. R., & Nur, M. A. (2022). Community empowerment through waste bank program in Mandar Sari kelurahan Banjar regency. *International Journal Political, Law, and Social Science*, 3(1).

Tranggono, M., Effendy, K., Lukman, S., & Tahir, M. I. (2020). Strategy of Remote Traditional Communities Empowerment Policy Implementation in Buru District. *International Journal of Governmental Studies and Humanities (IJGH)*, 3(1), 63–78.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>

Wahyudin, U. (2020). *Evaluasi Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil: Penelitian Evaluatif Berdasarkan Stake's Countenance Model Tentang Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Di Kampung Ulakin Distrik Kolf Brasa*